



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN**  
NOMOR : SDM-SM.03.03-01089

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama	:	Siti Ajeng Ramadhani Susanti, S.H.
NIP	:	199701172020122001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bandar Lampung, 17 Januari 1997
Pangkat/ Golongan	:	Penata Muda TK. I / IIIb
Jabatan	:	Analis Hukum Ahli Pertama
Satuan Kerja	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kualifikasi	:	<b>BAIK SEKALI</b>

telah memenuhi kompetensi jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan IX Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 10 April 2025 sampai dengan 27 Mei 2025 di Depok selama 210 (dua ratus sepuluh) Jam Pelajaran.



Depok, 27 Mei 2025  
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Gusti Ayu Putu Suwardani

# MATERI PELATIHAN

## A. Materi Wawasan

1. *Building Learning Commitment*
2. Perkembangan dan Tuntutan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Penataan Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia
4. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan
5. Kode Etik Analis Hukum
6. Komunikasi Efektif Bagi Analis Hukum
5. Klasifikasi Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berdasarkan Pembidangan Hukum atau Pembagian Urusan Pemerintahan
6. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Hukum dan Perijinan
7. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Perdata
8. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara
9. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan
10. Penyusunan Kerangka Materi dalam rangka Advokasi Hukum di Luar Pengadilan

## B. Materi Inti

1. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
2. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis
3. Penyusunan Kerangka Materi dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
4. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Penyusunan Konsep Perjanjian Instansi Pemerintah

## C. Materi Aktualisasi

1. Pengembangan Karier Fungsional Analis Hukum
2. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
3. Aktualisasi Kegiatan Klasifikasi Bahan dan Data, serta Permasalahan Hukum

Depok, 27 Mei 2025

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto